



PROFIL

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG



BANDUNG, 30 DESEMBER 2016

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Profil Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2016.

Profil ini disusun dengan maksud memberikan laporan kepada Pimpinan tentang lingkup tugas yang telah dilaksanakan dari semua kegiatan-kegiatan dengan sarana pendukungnya selama Tahun Anggaran 2016. Profil ini bertujuan agar pimpinan memperoleh gambaran secara garis besar tentang pelaksanaan tugas pokok dan tanggungjawab yang dibebankan Pimpinan kepada Dilmil II-09 Bandung selama tahun anggaran tersebut.

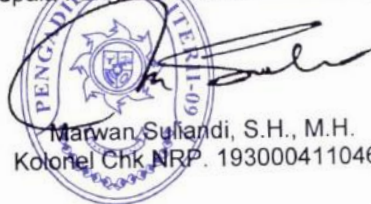
Profil kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru yang belum ditampilkan sebelumnya, seperti informasi mengenai perkara dan keuangan. Selain itu berbagai data melalui Website termasuk perkara yang sudah diputus juga ditampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh warga pengadilan. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal, dan berintegritas dalam lingkungan lembaga Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Kami sadari bahwa dalam pelaporan masih banyak kekurangan baik metode penyampaian maupun akurasi kevalitan data, sehingga kemungkinan besar belum seperti apa yang diharapkan oleh pimpinan satuan atas. Dengan berbagai Kendala dan keterbatasan, laporan ini kami sampaikan sebagai bahan acuan dan gambaran global dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Akhir kata, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dan jajarannya.

Bandung, 30 Desember 2016

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Marwan Sulandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930004110466

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

I. Profil Daerah

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50'-7°50' Lintang Selatan dan 104° 48'- 108° 48' Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 3.710.061,32 hektar. Jumlah penduduknya pada tahun 2011 mencapai 46.497.175 jiwa secara administratif sejak tahun 2008, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Jawa Barat terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP) Wilayah, sebagai berikut wilayah I Bogor meliputi Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. sukabumi, Kota sukabumi dan Kab. Cianjur. Wilayah II Purwakarta meliputi Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi. Wilayah III Cirebon meliputi Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan. Wilayah IV Priangan meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi,

Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar.

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas 1 Sekretariat Daerah dengan 12 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 17 Badan, 17 Lembaga Teknis, 3 Lembaga Lain, 3 Rumah Sakit Daerah, 121 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, dan 1 unit Pelaksana Teknis Badan. Usaha terbesar yang menyerap lapangan kerja di Jawa Barat adalah sektor pertanian, sektor perindustrian, dan sektor perdagangan.

Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki perilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.

Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah ; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.

Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.

II. Wilayah Hukum

Berikut ini adalah peta yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung :



Adapun *iusiisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah di gariskan oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang Agung, luhur dan ideal.

III. Sejarah Singkat.

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum

dilingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 Pasal 24 menetapkan :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian struktur organisasi peradilan militer masih mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal



21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer.

Daftar nama-nama Kadilmil pada Pengadilan Militer II-09 Bandung :

1		<p>Nama : Atang Dana Mihardja, S.H. NRP/NIP : 12904 Pangkat/Golongan : Letkol Chk Jabatan : Kamahmil Priangan Bogor</p>
2		<p>Nama : Soegiyono, S.H. NRP/NIP : 202734 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kamahmil Priangan Bogor (1976-1978)</p>
3		<p>Nama : R. Srijono Putro Lelono, S.H. NRP/NIP : 296873 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kamahmil Priangan Bogor (1978-1981)</p>
4		<p>Nama : Edi Purnomo, S.H. NRP/NIP : 495635 Pangkat/Golongan : Letkol Kum Jabatan : Kamahmil Priangan Bogor (1981-1982)</p>
5		<p>Nama : Sudrajat, S.H. NRP/NIP : 493895 Pangkat/Golongan : Letkol Chk Jabatan : Kamahmil Priangan Bogor (1982-1985)</p>

6		Nama : Iko Soepriyono, S.H. NRP/NIP : 21003 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kamahmil II-09 (1985-1987)
7		Nama : Machmud Husni, S.H. NRP/NIP : 21993 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Pgs Kamahmil II-09 (1988)
8		Nama : M. M. Ginting, S.H. NRP/NIP : 23747 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kamahmil II-09 (1988-1991)
9		Nama : Chalid Karim Leo, S.H. NRP/NIP : 23994 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kamahmil II-09 (1991-1992)
10		Nama : Alex Bakari, S.H. NRP/NIP : 52371/P Pangkat/Golongan : Kolonel Laut (KH) Jabatan : Kamahmil II-09 (1992-1993)
11		Nama : Iman Sudrajat, S.H. NRP/NIP : 26679 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kamahmil II-09 (1993-1995)
12		Nama : Hormat Pakpahan, S.H. NRP/NIP : 381545 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kamahmil II-09 (1995-1997)

13		Nama : Hanny Sunanrny, S.H. NRP/NIP : 400379 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk (K) Jabatan : Kamahmil II-09 (1997-2001)
14		Nama : Drs. Burhan Dahlan, S.H. NRP/NIP : 30248 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil II-09 (2001-2002)
15		Nama : Hazarmein, S.H. NRP/NIP : 32853 Pangkat/Golongan : Letkol Chk Jabatan : Pgs Kadilmil II-09 (2001-2007)
16		Nama : Purnomo, S.H. NRP/NIP : 320118 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil II-09 (2007-2009)
17		Nama : Sutrisno Setio Utomo, S.H. NRP/NIP : 33690 Pangkat/Golongan : Letkol Chk Jabatan : Pgs Kadilmil II-09 (2009-2011)
18		Nama : Hidayat Manao, S.H. NRP/NIP : 33396 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil II-09 (2011-2012)
19		Nama : Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. NRP/NIP : 1910006941265 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil II-09 (2012-2015)

20		Nama : Apel Ginting, S.H., M.H. NRP/NIP : 1930005770667 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil II-09 (2015-2016)
21		Nama : Marwan Suliandi, S.H., M.H. NRP/NIP : 1930004110466 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil II-09 (2016-2017)

IV. Sarana dan Prasarana Kantor

Gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi pada bulan Nopember 2012 merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung berlokasi di Wilayah Kota Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Untuk mencapai lokasi ini cukup mudah dan dapat ditempuh dari beberapa arah yaitu :

- Dari Jakarta ke arah Cibiru, melalui Pintu Tol Pasteur, Pintu Tol Buah Batu dan Pintu Tol Kopo.
- Dari Cimahi ke arah Cibiru, dapat melalui Jalan Rajawali, Jalan Soekarno, juga bisa melalui Pintu Tol Pasteur, Pintu Tol Buah Batu dan Pintu Tol Kopo.
- Dari Cirebon, Pangandaran, Tasik, Garut, dapat melalui jalan ke arah Cibiru, juga dapat masuk melalui Pintu Tol Cileunyi keluar pintu tol Buah Batu.

Berikut ini data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer II-09 Bandung :

- a. Status Lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 13, Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan.
- b. Luas Tanah : 2000 m² (dua ribu meter persegi).
- c. Luas Bangunan : 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi).
- d. Batas-batas :
Sebelah Utara : Pemukiman Penduduk, Kel. Cipamokolan.
Sebelah Timur : Kantor Partai Demokrat, Jawa Barat.
Sebelah Selatan : Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung.
Sebelah Barat : Jalan dan Gang Parakan Saat, Bandung.

Berikut adalah tampak depan Gedung Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Bandung :



Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas untuk pejabat struktural maupun fungsional Hakim Militer dan Panitera.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Bangunan Kantor.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung yang semula menggunakan tanah dan bangunan milik Dephan RI yang berada di Jl. Jawa No. 60 Bandung berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung maka sejak tanggal 15 Oktober 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung pindah dan menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 745 Bandung sehingga Sarana dan prasarana gedung yang digunakan saat ini adalah aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas tanah \pm 2.000 M2 adalah milik Mahkamah Agung RI.

b. Rumah dinas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas untuk pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-09 Bandung sehingga saat ini Kadilmil II-09 Bandung masih menempati rumah sewaan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Bandung dengan biaya dinas.

2. Kendaraan bermotor.

Kendaraan dinas yang ada di Dilmil II-09 Bandung pada Tahun 2016, sebanyak 9 (Sembilan) unit yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, tahun 2005, Nopol. B-1400-VQ, kondisi baik (80 %).
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nissan, tahun 2011, Nopol.D-1837-E, kondisi sangat baik (90 %).

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Max II, tahun 2005, Nopol. 6037-PDQ, kondisi baik (70 %),
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, tahun 2006, Nopol. -D-6891-D, kondisi baik (70 %),
- 1 (satu) unit Honda Megapro Nopol. D-5736-D, tahun 2006, kondisi baik (83 %).
- 5 (lima) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, tahun 2008, masing masing Nopol.D-6147-D, D-6148-D, D-6149-D,D-6150-D kondisi baik (83 %).

3. Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Bahwa pada Tahun 2016 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melaksanakan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Seragam PDU IV, Pakaian Dinas Harian (PDH), Olah Raga dan Seragam Pramubakti dengan total biaya sebesar Rp. 33.291.500,- (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi dengan biaya sebesar Rp. 85.382.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Pengadaan Mebeuler dengan biaya sebesar Rp. 24.497.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Pengadaan Pembangunan Sumur Bor dengan biaya sebesar Rp. 49.617.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

b. Pemeliharaan

Bahwa selama Tahun 2015 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melaksanakan :

1) Pemeliharaan Gedung Kantor

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2016 mengadakan Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor sebesar Rp. 74.270.000,00,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan total biaya sebesar Rp. 107.350.000,- (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

c. Biaya Pengiriman Surat Dinas/Pos, Telepon, Internet, Listrik dan Web Hosting.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung dilengkapi dengan sarana pesawat telepon sebanyak 2 (dua) buah dengan Nomor : (022) 7335265, untuk ruangan Kadilmil dan Nomor : (022) 7335266 untuk Fek/Telp yang berada di ruang resepsionis, untuk fasilitas listrik dirasakan sudah cukup yaitu sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) hanya pagu anggarannya perlu ditambah karena setiap tahunnya tarif langganan jasa listrik terus naik. Sedangkan untuk Air Pengadilan Militer II-09 Bandung menggunakan Zet Pam. Langganan Jasa Internet, Telepon dan Web Hosting sebesar 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Biaya pengiriman surat dinas melalui Jasa Pos sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Biaya materai dan leges sebesar Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah).

d. Penghapusan

Bahwa dalam tahun 2016 Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak melaksanakan penghapusan aset yang berupa Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung.

V. Personalia.

Berikut daftar pegawai pada Pengadilan Militer II-09 Bandung :

1		Nama : Marwan Suliandi, S.H., M.H. NRP/NIP : 1930004110466 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil II-09 Bandung
2		Nama : Bambang Indrawan, S.H. NRP/NIP : 548944 Pangkat/Golongan : Letkol Chk Jabatan : Wakadilmil II-09 Bandung
3		Nama : Edi Purbanus, S.H. NRP/NIP : 539835 Pangkat/Golongan : Letkol Chk Jabatan : Hakim Militer Gol. V
4		Nama : Sugiarto, S.H. NRP/NIP : 548431 Pangkat/Golongan : Letkol Chk Jabatan : Hakim Militer Gol. V
5		Nama : Desman Wijaya, S.H., M.H. NRP/NIP : 13134/P Pangkat/Golongan : Mayor Laut (KH) Jabatan : Hakim Militer Gol. V
6		Nama : Nunung Hasanah, S.H., M.H. NRP/NIP : 11970027910670 Pangkat/Golongan : Mayor Chk (K) Jabatan : Hakim Militer Gol. VI

7		Nama : Kus Indarwati, S.H., M.H. NRP/NIP : 11980036240871 Pangkat/Golongan : Mayor Chk (K) Jabatan : Hakim Militer Gol. VI
8		Nama : Yudi Pranoto Atmojo, S.H. NRP/NIP : 11990019321274 Pangkat/Golongan : Mayor Chk Jabatan : Hakim Militer Gol. VI
9		Nama : Dedy Darmawan, S.H. NRP/NIP : 11990006941271 Pangkat/Golongan : Mayor Chk Jabatan : Hakim Militer Gol. VI
10		Nama : Dahlan Suherlan, S.H. NRP/NIP : 527705 Pangkat/Golongan : Mayor Sus Jabatan : Hakim Militer Gol. VI
11		Nama : Rony Suryandoko, S.IP., S.H. NRP/NIP : 11000045041178 Pangkat/Golongan : Mayor Chk Jabatan : Hakim Militer Gol. VI
12		Nama : Reza Yanuar, S.E., S.H. NRP/NIP : 11020016490177 Pangkat/Golongan : Mayor Chk Jabatan : Panitera
13		Nama : Supriyadi, S.H. NRP/NIP : 21950303390275 Pangkat/Golongan : Kapten Chk Jabatan : Sekretaris

14		Nama : Salimin, S.H. NRP/NIP : 21940118760172 Pangkat/Golongan : Kapten Chk Jabatan : Panmud Pidana
15		Nama : Sari Rahayu, S.H. NRP/NIP : 21000147090780 Pangkat/Golongan : Letda Chk (K) Jabatan : Panitera Pengganti
16		Nama : Yayat Sudrajat, S.H. NRP/NIP : 21010218101278 Pangkat/Golongan : Serma Jabatan : Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
17		Nama : Arnofy Widiastuti NRP/NIP : 21010295801182 Pangkat/Golongan : Serka Jabatan : Staf Panmud Pidana
18		Nama : Tri Wahyu Prasetiono NRP/NIP : 21050108790883 Pangkat/Golongan : Serka Jabatan : Staf Panmud Hukum
19		Nama : Cecep Supriyatna NRP/NIP : 31940482491173 Pangkat/Golongan : Serka Jabatan : Staf Umum
20		Nama : Sugiharjo NRP/NIP : 21060111960985 Pangkat/Golongan : Serka Jabatan : Staf Panmud Pidana

21		Nama : Wawan Setiawan NRP/NIP : 21060112380787 Pangkat/Golongan : Serka Jabatan : Staf Panmud Hukum
22		Nama : Dian Irmawan, S.H. NRP/NIP : 21070582611285 Pangkat/Golongan : Sertu Jabatan : Staf Panmud Pidana
23		Nama : Rudi Setia Bhakti NRP/NIP : 31990422881079 Pangkat/Golongan : Koptu Jabatan : Staf Kepegawaian dan Ortala
24		Nama : Mudhofar Maruf, S.E. NRP/NIP : 197110191992031002 Pangkat/Golongan : Penata / III C Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan
25		Nama : Wina Noviani Fatimah, S.T. NRP/NIP : 198611012011012009 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan
26		Nama : Priyadi NRP/NIP : 197004211992031001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Plh Kasubag Kepegawaian dan Ortala
27		Nama : Siti Mariam NRP/NIP : 195907261983102001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Staf Umum


28		Nama : Sri Supiyati Yuana NRP/NIP : 196011041985032002 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Staf Panmud Hukum
29		Nama : Muzaenab NRP/NIP : 196607091991032001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Staf Panmud Hukum
30		Nama : Suparjan NRP/NIP : 196611221993011001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Staf Panmud Pidana
31		Nama : Taryono, S.E. NRP/NIP : 197907182009121004 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Staf Umum dan Keuangan
32		Nama : Dinno Rinaldy, S.H. NRP/NIP : 197505022006041002 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III B Jabatan : Staf Panmud Pidana
33		Nama : Dewi Kurniawati NRP/NIP : 196807111997012001 Pangkat/Golongan : Penata Muda / III A Jabatan : Staf Panmud Pidana
34		Nama : Soebagio Eko Saputro NRP/NIP : 196408271998031001 Pangkat/Golongan : Penata Muda / III A Jabatan : Staf Keuangan

35		Nama : Cahyati Ratnasari NRP/NIP : 197810311998031001 Pangkat/Golongan : Penata Muda / III A Jabatan : Staf Panmud Pidana
36		Nama : Dani Mujabul Ahyar NRP/NIP : 197911282001121003 Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I / II D Jabatan : Staf Kepegawaian dan Ortala
37		Nama : Ade Suhara NRP/NIP : 196612091988031004 Pangkat/Golongan : Pengatur / II C Jabatan : Staf Umum

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tenaga honorer yang berjumlah 11 (sebelas) orang :

1.		Nama : Siswantoro Jabatan : Tenaga Kontrak/ <i>Security</i>
2.		Nama : Iman Sadarman Humendru Jabatan : Tenaga Kontrak/ <i>Security</i>
3.		Nama : Dikdik Jabatan : Tenaga Kontrak/ <i>Security</i>

4.		Nama : Latfullah Sulaeman Jabatan : Tenaga Kontrak/ <i>Security</i>
5.		Nama : Saripudin Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti
6.		Nama : Yudha Adi Andreanto Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti
7.		Nama : Dhani Handayana Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti
8.		Nama : Fajar Cipta Wandrian Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti
9.		Nama : Deden Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti
10.		Nama : Susilawati Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti

11.		<p>Nama : Panji</p> <p>Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti</p>
-----	---	--

VI. Keadaan Perkara

Berikut adalah jenis-jenis perkara yang masuk dan putus pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama Tahun 2016 :

A. Kejahatan

NO.	JENIS KASUS	SISA TAHUN 2015	MASUK TAHUN 2016	PUTUS TAHUN 2016	SISA TAHUN 2016	BANDING	KASASI	PK
1.	Atasan Memukul Bawahan	0			0			
2.	Desersi	18	101	93	24			
3.	Illegal Logging	0			0			
4.	Illegal Tapping	0			0			
5.	Insubordinasi	1	2	2	1	1	2	
6.	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0			0			
7.	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0			0			
8.	Kecelakaan lalu lintas	0	5	5	0			
9.	Kejahatan terhadap penguasa umum	0			0			
10.	Kekerasan dalam Rumahtangga	2	9	11	0			
11.	Kekerasan terhadap orang lain	0			0			
12.	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0			0			

NO.	JENIS KASUS	SISA TAHUN 2015	MASUK TAHUN 2016	PUTUS TAHUN 2016	SISA TAHUN 2016	BANDING	KASASI	PK
13.	Kepabeanan	0			0			
14.	Korupsi	0			0			
15.	Mangkir	3	19	22	0	1		
16.	Melawan Atasan	0	2	2	0			
17.	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0			0			
18.	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0			0			
19.	memaksa orang dengan kekerasan	0			0			
20.	Membuat atau memakai surat palsu	0			0			
21.	Menerima Hadiah	0			0			
22.	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0			0			
23.	Menghilangkan alat perang	0			0			
24.	Mengugurkan kandungan	0			0			
25.	merampas kemerdekaan seseorang	0			0			
26.	Minyak dan gas bumi	0			0			
27.	Narkotika Gol. I	0	22	19	3	15	12	
28.	Pelanggaran Lalin	0			0			
29.	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0			0			
30.	Pelanggaran susila	2	15	17	0	3	2	
31.	Pemalsuan Surat	0	1	1	0			
32.	Pembiaran Melakukan Pidana	0			0			

NO.	JENIS KASUS	SISA TAHUN 2015	MASUK TAHUN 2016	PUTUS TAHUN 2016	SISA TAHUN 2016	BANDING	KASASI	PK
33.	Pembunuhan	0	6	6	0	5	1	
34.	Pemerasan	0			0			
35.	Penadahan	1	5	5	1			
36.	Penculikan	0			0			
37.	Pencurian	0	7	3	3			
38.	Penganiayaan	1	13	12	2		1	
39.	Penganiayaan ringan	0			0			
40.	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0			0			
41.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0			0			
42.	Pengeroyokan	0	2	2	0			
43.	Penggelapan	0	2	2	0		1	
44.	Pengrusakan	0			0			
45.	Penipuan	1	4	4	1	1	2	
46.	Penjaga meninggalkan pos	1	0	1	0			
47.	Penyalahgunaan wewenang	0			0			
48.	Penyuapan	0			0			
49.	Perbuatan tidak menyenangkan	0			0			
50.	Perjudian	1	1	2	0			
51.	Perkawinan Ganda	1	6	7	0			
52.	Perkelahian	0			0			
53.	Perkosaan	0			0			
54.	Perlindungan anak	0	3	3	0	2	2	
55.	Pertanahan	0			0			
56.	Perzinahan	0	2	1	1	3	2	1
57.	Pornografi	0			0			

NO.	JENIS KASUS	SISA TAHUN 2015	MASUK TAHUN 2016	PUTUS TAHUN 2016	SISA TAHUN 2016	BANDING	KASASI	PK
58.	Psikotropika	0			0			
59.	Senjata api	1	4	3	0			1
60.	Tahanan Lari	0			0			
61.	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0			0			
62.	Tidak menaati perintah dinas	0	4	3	0			
63.	Lain-Lain	0			0	2	1	
Jumlah		33	235	226	36	34	27	2

Keterangan :

- 2 perkara senjata api dikembalikan kepada Otmil II-09 Bandung untuk dilimpahkan ke Dilmil III-19 Jayapura.
- 1 perkara insubordinasi dikembalikan kepada Otmil II-09 Bandung untuk dilimpahkan ke Dilmil III-17 Manado.
- 2 perkara inabsentia dikembalikan kepada Otmil II-09 Bandung karena Terdakwa sudah tertangkap/kembali ke kesatuan.
- 1 perkara pencurian dilimpahkan kepada Dilmil II-08 Jakarta karena kesatuan Terdakwa berada didaerah wewenang hukum Dilmil II-08 Jakarta.

B. Pelanggaran.

NO.	JENIS KASUS	SISA TAHUN 2016	MASUK TAHUN 2016	PUTUS TAHUN 2016	SISA TAHUN 2016	BANDING	KASASI	PK
	Perkara	-	66	65	-	-	-	-

	Pelanggaran							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

- 1 perkara pelanggaran dikembalikan ke Otmil II-09 Bandung karena An. Deni Irawan merupakan Tenaga Honorer dan digaji oleh kesatuan.

VII. Permasalahan Yang dihadapi.

1. Perangkat Lunak Pengendali

Untuk Perangkat Lunak Pengendali Organisasi mohon di tetapkan, setidaknya sebagai acuan dasar awal untuk menyusun uraian

tugas dan tanggung jawab jabatan sehingga terdapat kejelasan Organisasi dan Prosedur sementara yang diberlakukan sampai terbentuknya Organisasi dan Prosedur tetap Pengadilan Militer. Hal ini sangat kami butuhkan dalam perencanaan organisasi dan kejelasan penataan proses pembagian tugas dan tanggung jawab. Kep Pangab No Kep 01 tahun 1984 yang saat ini kami pakai sebagai dasar bila dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab Pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung terutama kepaniteraan dan kesekretariatan tentunya harus mengalami banyak penyesuaian

2. Kondisi Personel

Dengan kondisi Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini, terutama dalam mendukung tugas pokok dan teknis penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung kami sarankan hal-hal sebagai berikut :

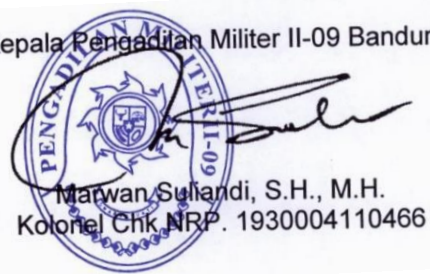
- Mohon dapatnya pengadaan rumah dinas bagi pejabat adilmil dan Waka Dilmil II-09 Bandung dikarenakan Kadilmil II-09 Bandung sampai saat ini masih menempati rumah sewaan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Bandung Dengan biaya dinas

sedang Waka Dilmil II-09 Bandung tinggal dirumah sewaan dengan biaya sendiri dikarenakan Rumah dinas milik Babinkum TNI yang terletak di Jl. Raja Mantri Tengah I Nomor 4 Buah Batu Bandung, bersamaan dengan perpindahan kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung ke kantor baru yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 745 Bandung sehingga gedung kantor lama yang terletak di Jl. Jawa No. 60 Bandung beserta rumah dinasnya telah dikembalikan kepada Babinkum TNI.

- Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas Pengadilan Militer II-09 Bandung, mohon penambahan tenaga Fungsional Panitera, Tenaga IT dan beberapa orang tenaga Staf Administrasi.
- Tersedianya Tenaga tehnik Informatika (IT) yang berkwalifikasi Sarjana Komputer dan staf khusus yang mengelola website untuk mendukung keterbukaan informasi tiap-tiap Pengadilan.
- Tersedianya Tenaga Pustakwan yang berkwalifikasi Ahli Kepustakaan untuk mengelola Perpustakaan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan tugas pokok.

Bandung, 31 Desember 2016

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Marwan Sulandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930004110466